BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu berarti telah mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi "keamanan nasional" (*national security*) suatu negara.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu negara dengan perekonomian yang maju dan juga sebagai salah satu negara yang memiliki kemajuan di bidang industri. Beberapa kemajuan dan kelebihan yang dimiliki Jepang ternyata tidak menjadikannya sebagai negara yang bisa mandiri secara kekuatan militer, sedangkan situasi yang terjadi di kawasan Asia Timur sampai sekarang tidak dapat terlepas dari konflik yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Terutama yang terjadi pada tahun 2006-2014 dimana dirasakan oleh Jepang ancaman yang timbul dari kawasan Asia Timur semakin meningkat. Khususnya dari China yang semakin memperkuat angkatan militernya dan juga selalu meningkatkan anggaran militernya secara terus menerus setiap tahunnya. Serta ancaman yang dirasakan dari Korea Utara yang memiliki persenjataan nuklir

yang sangat mengancam Jepang dengan selalu melakukan uji coba peluncuran rudal-rudalnya yang telah mencapai batas negara Jepang.

Dalam dinamika studi hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi pada lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional, dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, keamanan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional dan juga masalah sengketa internasional (http://www.theglobal-review.com/ diakses pada tanggal 27 Mei 2015).

Secara historis terutama sebelum tahun 1945, Jepang adalah negara dengan militer yang sangat kuat, namun sejak berakhirnya Perang Dunia II (PD II) Jepang tidak memiliki kekuatan militer. Sejak saat itu, secara faktual pertahanan Jepang sepenuhnya tergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan tersebut menyebabkan dunia internasional mengkritik Jepang karena di satu sisi Jepang tidak memberikan cukup kontribusi terhadap penjagaan stabilitas dan keamanan internasional, namun di sisi lain Jepang menikmati dan mendapatkan berbagai keuntungan yaitu terjaminnya keamanan jalur-jalur perdagangannya di berbagai belahan dunia. Pada tahap tertentu dunia internasional bahkan menekan Jepang untuk membangun kembali kekuatan militernya. Sumbangan Jepang secara

finansial dirasa tidak cukup dan tidak fair dalam upaya negara-negara untuk menjaga keamanan internasional. Jepang dituntut berpartisipasi sepenuhnya baik secara finansial maupun militer.

Keadaan ini menyebabkan Jepang mengalami dilema antara membangun kekuatan militernya kembali atau tidak. Jika pilihan yang pertama dilakukan maka akan muncul tentangan domestik karena hal itu bertentangan dengan Konstitusi Jepang tahun 1947 yang melarang Jepang untuk membangun kekuatan militernya. Selain itu secara eksternal negara-negara tetangga Jepang juga menentang pembangunan kembali militer Jepang, karena adanya kekhawatiran akan bangkitnya militerisme Jepang yang ekspansif di mana mereka pernah menjadi korbannya. Sebaliknya jika pilihan kedua yang dilakukan maka Jepang akan mendapatkan tekanan yang semakin besar dari banyak negara yang menganggap Jepang adalah *free rider* dari keamanan internasional yang diupayakan dan dijaga oleh dunia internasional (Heri, 2010: 66).

Berakhirnya perang dingin justru "menyimpan" banyak *flash points* yang cukup rawan dan setiap saat berkemungkinan berkembang menjadi gangguan stabilitas kawasan. Dari segi kepentingan Jepang (politik, ekonomi dan pertahanan), terdapat beberapa penilaian (*assessment*) yang mengidentifikasi beberapa masalah sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Jepang, yang dapat dibagi dalam dua kelompok persoalan, yaitu: pertama, krisis yang setiap saat dapat muncul di semenanjung Korea, keamanan di Selat Taiwan dan ketidakpastian (*uncertainty*) tingkat hubungan antara RRC dengan Rusia; kedua,

kerawanan wilayah laut (*troubled sea*) di Asia Tenggara dan di Asia Timur yang merupakan jalur laut vital bagi kehidupan perekonomian Jepang.

Kementerian pertahanan Jepang menilai bahwa persoalan yang belum dapat terselesaikan di wilayah laut Asia Tenggara dan Asia Timur, akan memberi pengaruh bagi kepentingan nasional Jepang, dan Jepang sedang menggagas untuk menggalang dan kemudian membentuk kerja sama *security multilateral* dalam rangka mengamankan wilayah laut tersebut (https://oseafas.wordpress.com/2010/03/16/sistem-pertahanan-jepang-di-asia-tenggara/, diakses pada 15 Mei 2015)

Berbagai pencapaian dan formulasi kebijakan luar negeri yang berorientasi pada perekonomian Jepang beberapa dekade terakhir telah memberikannya status negara maju dengan tingkat kekuatan ekonomi yang kuat. Namun hal tersebut pada perkembangannya juga dirasakan bersifat tidak sepadankarena status Jepang sebagai negara yang kuat dalam ekonomi tidak diiringi dengan status politik dan militer yang kuat untuk mengimbangi peran sertanya dalam politik global sehingga timbul anggapan bahwa Jepang adalah "raksasa ekonomi sekaligus kurcaci politik" (Irsan.2007:76).

Bagi Jepang, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya, melakukan sebuah peninjauan kembali terhadap kebijakan luar negeri untuk tujuan penyesuaian peran ekonomi dan politik merupakan langkah yang dilematis. Bersifat dilematis karena untuk melakukan penyesuaian tersebut, berarti sama dengan melakukan peningkatan atau perluasan arah kebijakan serta daya tawar dari peran pertahanan-

keamanannya. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan-keamanan Jepang merupakan dua kebijakan yang selalu selaras. Penyesuaian dalam kebijakan pertahanan-keamanan kemudian menjadi tantangan tersendirikarena hal tersebut berhubungan dengan larangan konstitusinya serta pandangan psikologis masyarakat Jepang yang pada umumnya menganggap tabu topik militer (Irsan, 2007: 87)

Dalam pemerintahan terjadi dua pendapat tentang pengembangan kekuatan militer, pihak yang pertama menghendaki pengembangan kekuatan militer sedangkan pihak yang lain menolak kekuatan militer yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Masyarakat Jepang pun banyak yang kurang setuju diadakannya pengembangan kekuatan militer Jepang. Namun dalam hal keuangan militer meski belum mencapai 1% dari GNP, jepang menduduki peringkat ke 8 dengan biaya militer terbesar. Untuk menanggapi dua pendapat diatas pemerintahan Jepang mengambil sikap dengan menerapkan sistem konfrehensif yaitu suatu sikap yang melandaskan pertahanan Jepang atas tiga hal yaitu:

1. Kekuatan militer hanya seperlunya atau tidak seberapa besar.
2. Kemampuan ekonomi berupa pemberian bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang.
3. Diplomasi yang dapat menjamin keamanan dan kepentingan-kepentingan Jepang.

Meski demikian pengadaan sistem senjata, Jepang meletakkan titik berat pada kualitas dibanding kuantitas. Pengadaan sistem senjata untuk membangun kekuatan militer yang sesuai dengan kondisi geografis Jepang. Meskipun presentase anggaran untuk militer terendah di dunia yaitu tidak mencapai 1%dari GNP-nya kekuatan militer Jepang tergolong kekuatan militer yang memadai yang kuat di dunia (https://www.academia.edu/5439410/Makalah_perang_pasific, diakses pada 21 Mei 2015)

Pasal 9 konstitusi 1947 Jepang, membatasi wewenang SDF (*Self Defence* Force) dengan hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri. Sehingga berakibat keamanan dan *survival* Jepang sangat tergantung dari jaminan *security* AS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *"US-Japan Mutual Security Treaty"* (MST) yang ditandatangani tahun 1951 dan berlaku pada April 1952 (http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9664.pdf, diakses pada 5 Mei 2015).

Setelah kekalahan Jepang pada PD II, sesuai Deklarasi Potsdam dan Instruksi GHQ (*General Head Quarter*) tentara Amerika Serikat (AS) mewajibkan pemerintah Jepang untuk membatalkan semua tenaga militer. Instruksi ini menjadi pasal 9 UUD 1947. Maka Jepang memilih jalan sebagai negara berdasarkan pasifism. Tetapi, karena makin tingkatnya perang dingin antara pihak AS dan pihak USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*), tentara AS mengubah kebijakan awalnya. AS menganggap Jepang sebagai *front-line* di Asia terhadap negara-negara sosialis (USSR dan *People Republic of China*). Waktu Perang

Korea terjadi pada 1950, GHQ menyuruh pemerintah Jepang mendirikan satu unit bersenjata sebagai bagian khusus kepolisian (*Keisatsu-Yobitai*). Lalu, pada 1952 unit ini dipisah dari kepolisian dan menjadi pasukan mandiri, bernama *Hoantai* (*Security force*). Akhirnya pada 1954, *Security Force* menjadi *Jieitai* (Pasukan bela diri), dan ditanggung oleh *National Defence Agency*. Pasukan ini melengkapi pasukan darat, pasukan laut dan pasukan udara (http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/shimadayuzuru/files/2011/03/paper_for_lecture_at_unand_on20110225.pdf, diakses pada 12 Februari 2015).

Kekalahan Jepang pasca PD II disamping menimbulkan banyak kehancuran fisik dan benda, juga mengakibatkan pukulan psikis yang amat berat. Trauma Perang Dunia Kedua membuat orang Jepang harus menurunkan senjata dan kekuatan militernya, bahkan pelajaran bela diri sempat dihapuskan dari sekolah. Jepang kini hanya memiliki JSDF (*Japan Self Defence* Force) yang bertujuan membela warga Jepang, namun tidak memicu perang dengan pihak lain (http://jurnalotaku.com/2015/02/03/memprotes-kebijakan-jepang-dalam-menangani-kasus-isis-produser-mitsuo-fukuda-balik-diprotes-oleh-netizen-jepang/, diakses pada 10 Mei 2015).

Sebanyak 10.000 warga Jepang melakukan aksi demo untuk menyampaikan bukti penolakan mereka atas rencana dari Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe untuk merubah konstitusi Pasal 9 di Tokyo. Warga Jepang menyayangkan rencana PM Shinzo Abe tersebut, karena sangat bersebrangan dengan konstitusi yang ada (www.theglobal-

review.com/content_detail.php?lang=id&id=15716&type=105#.Vbt47bVNpCl, doakses pada 15 Mei 2015)

Kejadian bakar diri karena menolak perubahan konstitusi Pasal 9 dari konstitusi Jepang tidak hanya sekali dilakukan, namun bisa dikatakan sering. Mengingat rakyat Jepang yang berfikir bahwa negaranya tidak akan ikut serta lagi dalam kekuatan militer apapun. Kejadian ini berlangsung di jembatan penyebrangan Nishi-Shinjuku di ibu kota Tokyo (http://dunia.tempo.co/read/news/2014/06/30/118589105/protes-kebijakan-pria-jepang-bakar-diri, diakses pada 15 Mei 2015).

Kebanyakan kalangan masyarakat Jepang memandang bahwa aliansi dengan Amerika Serikat masih bernilai penting, hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan pertahanan Jepang, akan tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya, kritik serta tantangan-tantangan mengenai aliansi tersebut juga banyak bermunculan, terutama mengenai kecenderungan Jepang untuk semakin terlibat dalam strategi kepentingan Amerika Serikat, nilai signifikandan netralitas aliansi pasca Perang Dingin, ketimpangan hubungan timbal balik yang telah disepakati kedua negara dimana banyak kalangan yang menilai bahwa hubungan tersebut hanya menguntungkan Jepang, serta pertentangan elit politik Jepang mengenai sah atau tidaknya aliansi apabila melihat Konstitusi 1947 (Irsan, 2007: 88-89)

Dampak panjang yang dirasakan Jepang sebagai negara yang tidak memiliki kekuatan militer adalah mengharuskannya tergantung pada kekuatan payung militer pertahanan Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan karena Jepang merasa banyaknya ancaman keamanan dari negara-negara tetangganya.

Uji coba rudal oleh Korea Utara menjadi salah satu ancaman utama bagi Jepang terutama pengembangan rudal-rudal balistik dan juga senjata penghancur masal lainnya oleh Korea Utara. Secara khusus masalah nuklir Korea Utara memiliki pengaruh serius pada keamanan nasional Jepang, sampai akhirnya peluncuran tujuh rudal balistik Korea Utara pada 5 Juli 2006 yang memicu ketidakstabilan di kawasan Asia Timur. Korea Utara juga mengaku terus mengembangkan teknologi rudal balistik nya untuk dikombinasikan dengan nuklir yang memicu ketegangan antara Jepang dengan Korea Utara. Langkah ini diambil Korea Utara karena menganut sistem "Militer Politik Utama" yang menekankan pentingnya mengutamakan kekuatan militer dan pasukan bersenjata (http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2008/10Part1_Chapter2_Sec2.pdf. 33. Diakses pada 12 Mei 2015).

Situasi memanas saat Korea Utara pada 10 Januari 2003 mengumumkan menarik diri dari NPT (*Non-Proliferation Treaty*). Menteri Luar Negeri Yoriko Kawaguchi langsung menyatakan penyesalan atas keputusan Korea Utara dan menyatakan Jepang sangat khawatir terhadap situasi itu. Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, mendesak Pyongyang membatalkan keputusan menarik diri dari NPT. Akan tetapi, Korea Utara tidak mengubris permintaan tersebut bahkan

pengembangan rudal Korea Utara terus dilakukan. Tahun 2003, satelit pengindera AS mendeteksi pengerjaan sebuah rudal balistik baru yang didasarkan pada model R-27 UniSoviet. Rudal balistik ini diluncurkan dari bawah permukaan air berbahan cair dengan jarak 2500km. Versi berbasis daratnya memiliki panjang 12 meter dan diameter 1.5 meter dengan jarak 2500-4000km. Korea Utara sementara itu terus mengembangkan "Taepodong 2" yang diperkirakan memiliki jarak antar benua (*http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2003/1/0110.html*, diakses pada 12 Februari 2015).

Bagi Korea Utara, Jepang adalah bagian AS di wilayah Asia-Pasifik yang sangat mengancam Pyongyang. Apalagi secara historis, Jepang pernah menjajah Semenanjung Korea pada paruh pertama abad ke-20 yang menimbukan kesengsaraan luas. Sampai saat ini, luka sejarah tersebut tampaknya masih belum sembuh dan acap menjadi pemicu krisis antara Korea (baik Korsel maupun Korut) dengan Jepang. Itulah sebabnya, dalam percobaan peluru kendali antarbenuanya, Korut sering menembakkan misilnya melintasi wilayah Jepang sehingga menimbulan kecemasan Negeri Sakura tersebut. Dalam tiga tahun terakhir, misanya, Korut sudah dua kali menguji coba rudal jarak jauhnya dengan melintasi Pulau Honshu. Peristiwa itu merupakan ancaman nyata Korut terhadap Jepang. Bayangkan, bila rudal itu membawa bom atom dan dijatuhkan di wilayah Jepang, berarti Negeri Sakura itu kembali akan menjadi korban nuklir yang sangat menyedihkan (http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13592, diakses pada 9 Mei 2015).

Dibawah konstitusi pasca perang, Jepang menolak politik kekuasaan dan memulai suatu pola yang secara keras membagi ekonomi dan politik. Untuk pertahanan dan keamanan, Jepang bersandar kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat menempatkan sejumlah pasukannya di Jepang untuk memelihara tatanan dan mempertahankan Jepang dari serangan luar (Maswood dalam Handayani, 2008: 2).

Dalam mengantisipasi ancaman dan kerawanan, ada dua pilihan strategi yang dapat dipilih, yaitu strategi keamanan nasional dan strategi keamanan internasional. Strategi keamanan nasional memfokuskan kebijakan pada upaya mengurangi kerawanan dari negara. Kerawanan dapat dikurangi dengan meningkatkan kemampuan atau kekuatan perlawanan untuk menghadapi ancaman tertentu. Ancaman militer dapat diatasi dengan memperkuat kekuatan militer, melakukan aliansi, atau mempertangguh negara dari serangan. Aliansi perlu dilakukan jika negara tidak dapat mengatasi ancaman dan kerawanan yang ada dengan kekuatan sendiri. Dibatasi oleh kerawanan dalam negeri, Jepang melihat aliansi dengan AS merupakan strategi penting yang diperlukan dalam kebijakan pertahanan Jepang (http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html, diakses pada 14 Februari 2015).

Ancaman yang dirasakan Jepang di kawasan Asia Timur adalah rezim Korea Utara dan Kim Jong Un beberapa kali mengeluarkan ancaman akan menyerang Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara diberitakan menempatkan sistem rudal di pantai timur. Roket Korea Utara punya jangkauan 4000 kilometer dan bisa

mencapai Korea Selatan, Jepang dan pangkalan militer Amerika di Pulau Guam. Sekalipun pengamat memperkirakan serangan itu hanya taktik Kim Jong Un, Jepang segera bereaksi (http://www.dw.de/hadapi-korea-utara-jepang-kerahkan-roket-patriot/a-16730431, diakses pada 10 Mei 2015).

Sengketa wilayah dengan China (pulau Shenkaku/Diaoyu) juga dirasakan menjadi salah satu masalah penting bagi Jepang, untuk itu Pemerintah Jepang mengerahkan kekuatan militer untuk merespon ancaman dari China dan Korea Utara. Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera, mengklaim telah menyebar pasukan-pasukan Jepang ke pulau-pulau di negaranya. Langkah Jepang itu sebagai reaksi atas sengketa Laut China Timur dengan China yang berkepanjangan (http://international.sindonews.com/read/816362/40/hadapi-ancaman-china-jepang-kerahkan-kekuatan-militer-1386847430, diakses pada 9 Mei 2015).

Hal lain yang dianggap dapat mengancam Jepang adalah peningkatan anggaran militer Cina yang signifikan dari tahun ke tahun. Kebijakan pemerintah Cina untuk menaikan anggaran pertahanannya tanpa adanya transparansi dari anggaran tersebut, telah menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan kecemasan sejumlah negara khususnya Jepang. Dampak yang sangat terasa dari kebijakan peningkatan anggaran militer Cina tersebut adalah berlanjutnya rivalitas hubungan antara Cina dengan Jepang yang diistilahkan “Perang Dingin Asia Timur”. Jepang sangat merasa khawatir atas peningkatan anggaran militer Cina yang tidak disertai transparansi tersebut. Kementerian Pertahanan Jepang dalam

pernyataan resminya “Cina menimbulkan kecemasan masyarakat internasional setelah Beijing mengumumkan kenaikan 17,6% anggaran militernya pada tahun 2008 Kementerian pertahanan akan terus berusaha agar Cina meningkatkan transparansi tentang kekuatan militernya dan memperhatikan kecemasan masyarakat internasional”.

Selain pernyataan resmi tersebut, Dalam *National Defense Program Outline* (NDPO) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Jepang sangat khwatir akan aktifitas modernisasi dan peningkatan anggran militer angkatan bersenjata Cina (PLA) dimana digambarkan bahwa terdapat 3 skenario kemungkinan Cina menyerang Jepang Pertama, Konfrontasi yang terjadi antara Jepang dan Cina akibat perebutan sumber daya alam di wilayah maritim, Kedua, Sengketa wilayah di pulau Senkaku dan Ketiga, Meningkatnya konflik Cina dan Taiwan (Purwanto, 2010:3-11).

Selain konflik dengan Cina, Jepang juga memiliki ketegangan dengan negara tetangga lainnya yaitu Korea Utara. Yang menjadi fokus utama Jepang adalah masalah nuklir yang dimiliki Korea Utara yang dianggap dapat mengancam Jepang. Uji coba nuklir kembali dilakukan Korea Utara pada tanggal 9 Oktober 2006. Dua hari pasca uji coba tersebut, pemerintah Jepang menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara, termasuk larangan impor. Jepang juga melarang semua kapal-kapal Korea Utara memasuki perairan Jepang. Uji coba senjata nuklir berlangsung di Provinsi Hamgyeong dengan kekuatan bom nuklir setara dengan 500 ton bahan peledak TNT. Keberhasilan Korea Utara melakukan

uji coba nuklir membuat Pemerintah Jepang, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Jepang berupaya mengambil tindakan tegas terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan PBB (Wulansari, 2008:9)

Penelitian tentang ketergantungan yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya dalam jurnal yang berjudul "Kebijakan Pertahanan Jepang: Tinjauan Strategis NDPG 2005" oleh Asra Virianita, membahas mengenai *National Defense Program Guidelines* (NDPG) sebagai suatu landasan pertahan Jepang dalam menyusun kebijakan pertahanannya tidak hanya mendefinisikan apa dan bagaimana seharusnya kemampuan pertahanan Jepang, tetapi juga menetapkan dengan jelas kebijakan keamanan mendasar Jepang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti tidak hanya bagaimana sistem pertahanan Jepang tetapi juga meneliti bagaimana ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat untuk sektor pertahanannya.

Penelitian lainnya yang membahas mengenai pertahanan Jepang adalah penelitian Faris Bimantara pada tahun 2012 yang berjudul "Pengaruh Pangkalan Militer AS di Okinawa (Jepang) terhadap Kerjasama Bilateral AS-Jepang dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Periode 2001-2006", Faris Bimantara menyatakan Kebijakan pertahanan keamanan yang dibuat Jepang setelah PD II membuat Jepang tidak memiliki kekuatan militer untuk dapat mempertahankan wilayahnya secara mandiri, maka dari itu diperlukannya aliansi dengan negara lain yaitu Amerika Serikat untuk dapat membantu mengamankan kedaulatan

Jepang dari situasi konflik kawasan di Asia Timur. Terdapat perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti berusaha menyajikan fakta bahwa hubungan yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan tidak hanya sekedar kerja sama saja, tetapi merupakan pola ketergantungan yang membuat Jepang pada akhirnya menjadi terikat dan tergantung kepada kekuatan pertahanan dari Amerika Serikat.

Heri Alfian dalam jurnal POLITEIA Ilmu Politik Vol. 2 yang berjudul "Dinamika dan Prospek Kebangkitan Militer Jepang" menyatakan Jepang yang tadinya menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat menjadi harus tunduk kepada kebijakan Amerika Serikat berdasarkan konstitusi yang dibuat menjadikan Jepang sebagai negara yang pasif dalam kekuatan militer dan berusaha menampilkan fakta-fakta bahwa Jepang mampu untuk mandiri secara militer. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah tidak menggambarkan bentuk ketergantungan antara Amerika Serikat dengan Jepang di bidang pertahanan yang membuat Jepang menjadi terbatas untuk dapat melindungi kedaulatan dan pertahanan wilayahnya.

Beberapa alasan mengapa peneliti mengambil topik ini, yaitu karena menurut peneliti topik ini merupakan topik ketergantungan yang baru yang dilakukan sebuah negara maju (Jepang) terhadap Amerika Serikat di bidang pertahanan. Dan topik ini menimbulkan rasa keingin tahuan peneliti tentang bagaimana sistem pertahanan yang dianut oleh Jepang serta apa saja bentuk ketergantungan pertahanan yang ada.

Berdasarkan fakta dan paparan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam sebuah laporan penelitian dengan judul:

"Hubungan Jepang Dan Amerika Serikat di Bidang Pertahanan Periode 2006-2014**"**

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa mata kuliah pokok yang telah dipelajari di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yaitu:

1. Analisis Politik Luar Negeri

   Dalam mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang interaksi para aktor politik atau pihak-pihak pemerintahan dengan lintas batas negara sehingga tergambar dengan jelas bagaimana sebuah negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain, dalam penelitian ini interaksi antara Jepang dengan Amerika Serikat.

2. Diplomasi HI Asia Timur

   Secara khusus mengkaji bagaimana keadaan Asia Timur dari berbagai segi (ekonomi, politik, budaya, konflik) yang memberikan gambaran kepada peneliti secara luas mengenai negara-negara di kawasan Asia Timur secara mendetail khususnya Jepang.

3. Hukum Internasional

   Sebagai sebuah kajian didalam penelitian ini yang menjelaskan mengenai interaksi antar negara, organisasi-organisasi internasional, dan subjek-

subjek hukum lainnya dalam mengatur keaneka ragaman kerjasama dan kegiatan. Hukum internasional bertugas mengatur segala macam interaksi seperti yang dijalankan oleh Jepang dengan Amerika Serikat untuk membantu mengamankan kedaulatan Jepang.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah membentuk sebuah pertanyaan umum yaitu,

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana hubungan Jepang dan Amerika Serikat di bidang pertahanan?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Untuk memfokuskan pertanyaan umum tersebut, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk hubungan Jepang dan Amerika Serikat di bidang pertahanan?
2. Mengapa rakyat Jepang sangat menentang pembangunan kembali kekuatan militer Jepang?
3. Bagaimanakah perkembangan pertahanan militer Jepang di masa yang akan datang?

Melihat luasnya permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba untuk membatasi masalah pada hubungan Jepang terhadap Amerika

Serikat dalam menyelesaikan permasalahan dengan China dan Korea Utara pada periode 2006-2014 karena pada tahun tersebut situasi antara ketiga negara (Jepang, Cina, dan Korea Utara) sedang memanas dan terlihat pola hubungan yang terjalin antara Jepang dengan Amerika Serikat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat di bidang pertahanannya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk hubungan Jepang terhadap Amerika Serikat di bidang pertahanan
2. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dalam masalah pertahanan
3. Untuk mengetahui alasan apa saja yang mendorong masyarakat Jepang menolak pembangunan kekuatan militer di Jepang
4. Untuk mengetahui perkembangan pertahanan militer Jepang dimasa depan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang sistem pertahanan di Jepang
2. Secara praktis penelitian ini dapat:
    a. Memberikan sumbangan kepada peneliti lain untuk dijadikan sumber dalam penelitian mengenai sistem pertahanan di Jepang.
    b. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional.